

PRINSIP KEBEBASAN BERSERIKAT DALAM SERIKAT BURUH SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAK NORMATIF PEKERJA

TYAGITA, ANDANTI

PEMBIMBING : Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.

LABOR, PROTECTION – LAW AND LEGISLATION

KKB KK-2 THB 12/11 Tya p

Copyright© 2011 by Airlangga University Library Surabaya

ABSTRAK

Hubungan kerja terjadi setelah adanya perjanjian antara pengusaha dan pekerja, di mana pekerja menyatakan kesanggupannya untuk bekerja kepada pengusaha dan pengusaha menyatakan kesanggupannya untuk membayar upah pekerja. Esensi pokok dari hubungan kerja adalah keberadaan pengusaha dan pekerja. Mereka saling melengkapi kebutuhan satu sama lain yang diharapkan akan saling menguntungkan. Namun dalam hubungan kerja terdapat kecenderungan akan adanya ketidakseimbangan kedudukan antara pekerja dan pengusaha di mana pekerja mempunyai posisi tawar lebih lemah daripada pengusaha. Fungsi peraturan perundang-undangan di bidang perburuhan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja serta pengusaha. Peraturan perundang-undangan tidak dapat digunakan secara maksimal apabila kurangnya pengetahuan pekerja akan prosedur perlindungan hukum dan kurangnya pemahaman akan hak-hak yang dimilikinya. Pengetahuan, pemahaman dan kecakapan pekerja akan hak normatif pekerja sangat dibutuhkan sebelum pekerja dapat memahami prosedur hukum untuk menuntut haknya setelah pelaksanaan kewajiban. Perjuangan para pekerja untuk menegakkan hak-hak normatif tidak serta merta dapat dilaksanakan, sebab dibutuhkan suatu dukungan nyata dari organisasi sebagai wadah untuk memperkokoh kedudukan pekerja. Hal ini kembali dikaitkan dengan hak fundamental pekerja, yakni salah satunya adalah kebebasan berserikat. Pekerja secara individual berada dalam posisi lemah dalam memperjuangkan haknya. Dengan pelaksanaan prinsip kebebasan berserikat, dapat diwujudkan dengan menjadi anggota dalam serikat pekerja. Berada dalam serikat pekerja, dapat meningkatkan posisi tawar pekerja. Prinsip kebebasan berserikat berfungsi sebagai hak dasar bagi pekerja untuk berorganisasi dan membentuk serikat pekerja termasuk dalam lapangan hukum perburuhan. Sebagai suatu prinsip dasar, prinsip kebebasan berserikat tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya pengakuan dari peraturan perundang-undangan. Perwujudan penerapan perlindungan hak-hak normatif pekerja oleh Serikat Buruh adalah melalui pembentukan perjanjian kerja bersama antara Serikat Buruh dengan pengusaha. Perjanjian kerja bersama merupakan bentuk perwujudan partisipasi langsung pekerja yang diwakili oleh serikat buruh dalam membuat peraturan yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pekerjaannya yang sebelumnya harus melalui tahapan perundingan bersama pengusaha. Selain itu pelaksanaan mogok kerja juga merupakan salah satu bentuk

penerapan penegakan hak normatif pekerja terkait dengan Serikat Buruh namun dalam pelaksanaan mogok kerja harus sesuai dengan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Apabila tidak sesuai maka akan menimbulkan akibat yang cukup fatal yang berkaitan dengan kelangsungan pekerjaan mereka. Tentu saja hubungan antara pekerja, Serikat Buruh dan pengusaha tidak bisa terlepas dari adanya perselisihan.

Kata Kunci: Hukum Perburuhan, Prinsip Kebebasan Berserikat, Hak Berserikat, Serikat Buruh, Perlindungan Hak Normatif Pekerja.

ABSTRACT

The working relationship after the agreement between employers and workers, where workers declare its ability to work to entrepreneurs and businessmen expressed its ability to pay workers' wages. Basic essence of working relationship is the presence of employers and workers. They complement each other's needs are expected to be mutually beneficial. But there is a tendency in the working relationship will position an imbalance between workers and employers in which workers have a weaker bargaining position than employers. The function of legislation in the field of labor is intended to provide protection to workers and employers. Legislation can not be used optimally if the lack of knowledge workers will be the procedure of legal protection and lack of understanding of the rights they have. Knowledge, understanding and skills of workers' basic rights of workers will be needed before workers can understand the legal procedures for demanding their rights after the implementation of obligations. Workers struggle to uphold basic rights not necessarily be implemented, because it takes a real support from the organization as a forum to strengthen the position of workers. This is again attributed to the fundamental rights of workers, ie, one of which is freedom of association. Individual workers are in a weak position in the fight for their rights. With the implementation of the principle of freedom of association, can be realized by becoming a member of the union. Being in a union, can improve the bargaining position of workers. The principle of freedom of association serves as a basic right for workers to organize and form unions included in the labor law field. As a basic principle, the principle of freedom of association can not stand alone without any acknowledgment of the legislation. Embodiment of the application of the protection of workers' basic rights by the Union is through the establishment of collective bargaining between the union with the employers. Collective labor agreement is a form of embodiment of the direct participation of workers represented by unions in making rules that can be used in the implementation of the work that previously had to go through the stages of negotiations with employers. Besides the implementation of a strike is also one form of the application of enforcement of workers' basic rights associated with the Union but in the implementation of a strike shall be in accordance with that stipulated by the legislation. If not fit then it will lead to

potentially fatal consequences associated with the continuity of their work. Between workers, trade union and employers can not be separated from the dispute.

